

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KONTEKSNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA DI JAWA)

Siti Rokhimah^{1*}, Handani Maheresmi²

^{1, 2}Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

¹sitirokhimah@upnyk.ac.id, ²handani.maheresmi@upnyk.ac.id

Abstract, *Local government financial performance reflects the effective and accountable allocation of public resources. Good financial management enables the government to implement sustainable development programs, thereby supporting efforts to improve the welfare of the community at the local level. This study aims to analyze the financial performance of local governments. An assessment of community welfare conditions is also conducted. This study employs a descriptive quantitative approach by analyzing local government financial reports (LKPD) based on Wang's (2007) indicators, which include cash solvency, budget solvency, long-term solvency, and service solvency. The data used includes 116 LKPD from 29 cities on the island of Java during the period 2019-2022, as well as Human Development Index (HDI) data published by the Central Statistics Agency (BPS). The results of the study indicate that, in general, the four dimensions comprehensively reflect the ability of local governments to maintain liquidity, financial sustainability, and the quality as well as sustainability of public services. However, there are still areas where expenditures exceed per capita income, which requires attention in budget management to maintain fiscal balance.*

Keywords: *Financial Performance, Solvency, Welfare.*

Abstrak, Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan pengalokasian sumber daya publik secara efektif dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan sehingga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengkajian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat juga dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menganalisis LKPD berdasarkan indikator Wang (2007) mencakup dimensi solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Data meliputi 116 LKPD dari 29 kota di Pulau Jawa selama periode 2019-2022 serta data IPM yang dipublikasikan BPS. Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar keempat dimensi tersebut secara komprehensif mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga likuiditas, kesinambungan keuangan, serta kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik walaupun masih ada daerah yang memiliki selisih antara pengeluaran yang melebihi pendapatan dalam skala per penduduk, hal ini menjadi perhatian untuk pengelolaan anggaran agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Solvabilitas, Kesejahteraan.*

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir>



Copyright © 2024

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri (Indonesia, 2014). Salah satu fungsi esensial pemerintah adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang sangat penting dalam rangka perwujudan tujuan tersebut yaitu berupa peningkatan kualitas pelayanan publik (Wardhani et al., 2017).

Pelayanan publik yang maksimal, dapat diupayakan oleh pemerintah daerah melalui pengumpulan pendapatan dan pengalokasiannya dilakukan dengan optimal. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, merata, serta berorientasi pada keberlanjutan (Marbun et al., 2023). Kewenangan penuh yang dimiliki daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mudah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Zein & Septiani, 2024). Kesehatan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor penting untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan publik di masa depan (Huang and Ho, 2013; Mamun & Chowdhury, 2022).

Pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin besar pula kepercayaan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat daya saing daerah melalui penciptaan lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif. Hal ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup, pengurangan kesenjangan sosial, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi, memperbaiki sistem birokrasi, dan membangun budaya pelayanan yang profesional dan inklusif. Upaya tersebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengeluaran secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung program-program prioritas seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengeluaran yang terencana dan bertanggung jawab, pemerintah daerah tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan akan menambah dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2006 dan Habbe, 2021). Apabila dikaitkan dengan tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran tersebut, semakin signifikan pula kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Habbe, 2021). Pemerintah daerah dituntut untuk mengintensifkan upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah kerap menimbulkan implikasi negatif, seperti tidak maksimalnya mutu pelayanan publik serta ketidakefektifan dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks tersebut, kinerja keuangan daerah secara umum digunakan sebagai acuan dalam menilai derajat kesejahteraan masyarakat (Suranta et al., 2019).

Nyberg (2016) menyatakan bahwa kesejahteraan sebagai sistem sosial dimana negara memikul tanggung jawab utama untuk kesejahteraan warga negaranya, seperti

dalam hal perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keamanan. Program kesejahteraan sebaiknya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Malik, 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang dan kesehatan yang baik, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu estimasi jumlah tahun hidup yang diharapkan bagi seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut usia tetap konstan sepanjang hidupnya. Dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencerminkan rerata tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu estimasi jumlah tahun pendidikan formal yang kemungkinan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Sementara itu, dimensi standar hidup layak ditunjukkan melalui indikator pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Saepudin, 2018).

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara optimal guna mewujudkan kemandirian daerah, yang merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan daerah, baik secara kuantitatif melalui capaian kinerja keuangan maupun secara kualitatif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Silitonga, 2021). Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang sering dijadikan acuan adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjelaskan bagaimana sekelompok penduduk di suatu wilayah dapat mengakses hasil-hasil pembangunan berupa standar hidup layak, kesehatan, dan pendidikan (Silitonga, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur kemajuan jangka panjang dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat; akses terhadap informasi serta kondisi kehidupan yang layak (Hanifi Van et al., 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa IPM ialah bagaimana penduduk dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (Simatupang, 2020). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Habbe (2021) bahwa tiga indikator yang mengukur IPM: pendapatan per kapita masyarakat, angka harapan hidup dan tingkat pendidikan.

Kemakmuran suatu bangsa tidak hanya bergantung pada investasi sumber daya fisik dan teknologi saja, melainkan pada investasi sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Negara akan berkembang lebih cepat jika memiliki sumber daya manusia yang lebih tinggi (Kousar et al., 2023). Investasi dalam pengeluaran pemerintah signifikan untuk lebih mendorong pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi (Maharda & Aulia, 2020). Orang yang lebih berpendidikan cenderung lebih inovatif sehingga dapat mempengaruhi produktivitasnya (Bhowmik, 2018). Investasi pada sumber daya manusia merupakan salah satu investasi yang paling penting memberikan tingkat pengembalian tertinggi dalam hal output (Linhartová, 2020). IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintahnya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Listiyani et al., 2022).

Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan dimensi solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan sebagaimana dikembangkan oleh Wang (2007). Selanjutnya, kajian ini juga menyajikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Penyajian data dilakukan secara deskriptif untuk menunjukkan kondisi kinerja keuangan dan capaian indeks pembangunan manusia pada masing-

masing daerah, sehingga dapat memberikan potret menyeluruh mengenai situasi fiskal dan sosial ekonomi yang terjadi dalam periode penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori stewardship mengarah pada perilaku sesuai kepentingan bersama. Para ahli stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal (Pasoloran, 2001 dan Davis et al., 2018). *Steward* melindungi dan memaksimalkan kepentingan *shareholders* melalui kinerja organisasi, karena dengan melakukan hal tersebut, fungsi utilitas pengurus akan dimaksimalkan (Davis et al., 2018). Pada keuangan daerah, pejabat publik sebagai "pengelola" yang bertanggung jawab atas sumber daya publik demi kepentingan rakyat (prinsipal). Kinerja keuangan dinilai dari seberapa besar pemerintah daerah berkomitmen untuk melayani masyarakat, bukan sekadar patuh terhadap aturan sehingga sebagai prinsipal (masyarakat) merasa puas. Misalnya terjadi kesesuaian antara belanja daerah dan prioritas publik, pelayanan publik yang pro-rakyat.

Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat. IPM digunakan sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk (Listiyani et al., 2022). Peningkatan IPM perlu kebijakan-kebijakan afirmatif untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung atau marjinal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Simatupang, 2020). Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kemampuan penduduk dalam memanfaatkan hasil pembangunan untuk mendapatkan pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta standar kehidupan yang memadai (Zein & Septiani, 2024).

Kinerja Keuangan Daerah

Konsep "kesehatan fiskal" atau "kesehatan keuangan" relatif abstrak yang tidak dapat diamati secara langsung dan diukur secara tepat (Bisogno et al., 2019; Mamun & Chowdhury, 2022). Kesehatan fiskal meningkat ketika lingkungan dikelola dengan baik, kelonggaran fiskal tinggi, kewajiban jangka pendek terpenuhi, dan kewajiban jangka panjang sepadan dengan permintaan dan sumber daya (Martell, 2024).

Pada konteks ini, kinerja keuangan menjadi salah satu penentu utama tercapainya kesehatan fiskal yang stabil dan berkelanjutan. Kinerja keuangan menggambarkan seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Suranta et al., 2019). Maher dan Nollenberger (2009) mendefinisikan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada, bertahan dari gangguan ekonomi, dan memenuhi tuntutan pertumbuhan dan penurunan. Kinerja dapat didefinisikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu. Pengukuran dan indikator kinerja merupakan bagian dari proses manajemen strategis. Oleh karena itu, sebagai salah satu elemen manajerial, kinerja merupakan kunci keberhasilan (Habbe, 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah (Habbe, 2021). Sejalan dengan hal tersebut Khairudin dan Aminah (2017) menyebutkan

bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut dalam rangka mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengelola keuangan, menuntut kemandirian daerah untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Zein & Septiani, 2024). Faktor keuangan sangat penting dalam mengukur kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya (Marbun et al., 2023). Wang (2007) menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan yaitu solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang serta solvabilitas layanan.

Dimensi Solvabilitas Kas

Solvabilitas kas meliputi tiga indikator, yaitu rasio kas, rasio lancar, dan rasio cepat. Nilai yang lebih tinggi dari ketiga indikator ini menunjukkan bahwa aset yang tersedia dan lembaga mampu memenuhi kewajiban lancarnya (Mamun dan Chowdhury, 2022).

Rasio Kas: rasio ini hanya memperhitungkan jumlah “kas, setara kas, dan investasi” dalam aset lancar yang disertakan. Perhitungan rasio ini yaitu $(\text{Kas} + \text{Setara Kas} + \text{Investasi}) / \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}$ (Wang et al., 2007).

Rasio Cepat: rasio ini hanya memperhitungkan jumlah “kas, setara kas, investasi, dan piutang” dalam aset lancar yang disertakan. Perhitungan rasio ini yaitu $(\text{Kas} + \text{Setara Kas} + \text{Investasi} + \text{Piutang}) / \text{Kewajiban Jangka Panjang}$ (Wang et al., 2007).

Rasio Lancar: rasio ini dihitung dengan membagi Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek (Wang et al., 2007).

Dimensi Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran mencakup dua indikator (rasio operasi dan surplus (defisit) per kapita) untuk mengukur kesehatan keuangan. Solvabilitas anggaran yang lebih tinggi mengindikasikan kondisi yang lebih baik (Mamun dan Chowdhury, 2022). Solvabilitas anggaran, yang mengacu pada kemampuan organisasi publik untuk mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran yang diwajibkan secara hukum tanpa mengalami defisit (Cuadrado-Ballesteros et al., 2019).

Rasio Operasi: rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan dengan total belanja (Wang et al., 2007).

Surplus atau Defisit Per Kapita: Total Surplus (defisit) mewakili Perubahan Aset Bersih. Rasio ini dihitung dengan membagikan total surplus atau defisit dengan jumlah populasi (Wang et al., 2007)

Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang mencakup tiga indikator: rasio aset bersih, rasio kewajiban jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang per kapita, untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka panjang yang ada (Mamun dan Chowdhury, 2022)

Rasio Aset Bersih: rasio yang lebih tinggi menunjukkan posisi yang lebih baik untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara aset terikat dan tidak terikat neto dibagi dengan total aset (Wang et al., 2007).

Rasio Kewajiban Jangka Panjang: kewajiban jangka panjang (tidak lancar) adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah kewajiban jangka panjang dengan total aset (Wang et al., 2007).

Rasio Kewajiban Jangka Panjang Per Kapita: rasio ini menghitung terkait kewajiban jangka panjang (tidak lancar) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dengan dibagi total jumlah populasi (Wang et al., 2007).

Dimensi Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Indonesia, 2020). Solvabilitas tingkat layanan, mengacu pada kapasitas pemerintah untuk menyediakan tingkat layanan publik yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial warga negara (Cuadrado-Ballesteros et al., 2019). Pada dimensi ini terdapat 3 (tiga) rasio yaitu pajak per kapita, pendapatan per kapita, serta belanja per kapita.

Pajak Per Kapita: menunjukkan bahwa pajak per kapita yang lebih tinggi mengindikasikan beban pajak yang lebih tinggi bagi penduduk begitu pula sebaliknya. Rasio ini dihitung berdasarkan pendapatan pajak dibagi dengan jumlah populasi (Wang et al., 2007).

Pendapatan per kapita: yang lebih tinggi mengindikasikan pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduk untuk dibayar begitu juga sebaliknya. Rasio ini dihitung dari total pendapatan dibagi dengan total populasi (Wang et al., 2007).

Belanja per kapita: Biaya per kapita yang lebih tinggi menunjukkan pemerintah yang lebih mahal. Rasio ini dihitung dengan membagi total biaya dibagi dengan total populasi (Wang et al., 2007).

METODE PENELITIAN

Data bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se Pulau Jawa Tahun Anggaran 2019-2022 dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi dari penelitian ini berjumlah 116 yang terdiri dari 29 kota di Pulau Jawa selama 4 tahun. Laporan Keuangan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penelitian ini berfokus pada kota di Pulau Jawa yang berjumlah 29 kota. Lima Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta dikecualikan karena memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan antara kota dan kota administratif dari aspek pemerintahan dan anggaran adalah kota administratif bukan daerah otonom karena APBD dibiayai melalui Provinsi DKI Jakarta (Alfauzi, 2022). Perbedaan perkembangan di setiap wilayah disebabkan dari berbagai faktor yaitu kondisi fisik lingkungan, karakter dan budaya, dan ketersediaan fasilitas pelayanan (Wardana et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator yang dikembangkan oleh Wang (2007). Dimensi keuangan digunakan untuk mengukur kondisi keuangan dan kesehatan fiskal. Menurut McDonald (2018) Dimensi pertama yaitu solvabilitas kas dengan indikator rasio lancar, semakin besar nilai rasio menunjukkan ketersediaan aset lancar yang lebih banyak untuk menutup kewajiban jangka pendek. Dimensi kedua yaitu solvabilitas anggaran dengan indikator rasio operasional serta surplus atau defisit per kapita, semakin besar nilai rasio menjelaskan tingkat solvabilitas anggaran yang tinggi, sehingga mampu menutup biaya layanannya secara berkelanjutan dengan pendapatan yang diterima. Dimensi ketiga yaitu solvabilitas jangka panjang dengan indikator rasio aset bersih, rasio kewajiban jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang per kapita. Semakin tinggi nilai

rasio aset bersih maka kemampuan membayar kewajiban semakin besar. Sebaliknya, rasio kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka panjang per kapita memiliki nilai harapan yang rendah. Nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa beban utang lebih ringan dan masih berada dalam batas yang wajar. Rasio ini juga menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan fiskal serta keadilan antargenerasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimensi keempat adalah solvabilitas layanan dari pajak per kapita, pendapatan per kapita, dan belanja per kapita. Pajak per kapita mengukur besarnya beban pajak daerah yang harus ditanggung oleh setiap penduduk. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah membiayai aktivitasnya melalui pungutan pajak terhadap penduduk. Pendapatan per kapita mengukur total pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk setiap penduduk. Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik bagi setiap penduduk. Belanja per kapita mengukur total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk setiap penduduk. Rasio belanja per kapita menunjukkan tingkat pengeluaran daerah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan per penduduk. Menurut Ritonga (2023) nilai harapan untuk ketiga rasio ini adalah rendah.

Analisis ini mengkalkulasi nilai median menggunakan uji solvabilitas Wang, et al (2007). Perhitungan dengan menggunakan median lebih efektif dibandingkan rata-rata dalam mengelompokkan data yang mengandung *outlier* (Matdoan et al., 2023). Tabel 1 menyakin populasi penelitian yang berasal dari Pemerintah Kota Non Administratif se Pulau Jawa.

Tabel 1. Populasi (Kota se Pulau Jawa)

No	Pemerintah Kota	No	Pemerintah Kota
1	Magelang	16	Batu
2	Pekalongan	17	Blitar
3	Salatiga	18	Kediri
4	Semarang	19	Madiun
5	Surakarta	20	Malang
6	Tegal	21	Mojokerto
7	Bandung	22	Pasuruan
8	Banjar	23	Probolinggo
9	Bekasi	24	Surabaya
10	Bogor	25	Yogyakarta
11	Cimahi	26	Cilegon
12	Cirebon	27	Serang
13	Depok	28	Tangerang
14	Sukabumi	29	Tangerang Selatan
15	Tasikmalaya		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menyajikan hasil olah data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. Nilai Median Tiap Indikator Keuangan

Dimensi	Indikator	Median			
		2019	2020	2021	2022
Solvabilitas Kas	Rasio Lancar	11,27	10,81	12,68	12,76
Solvabilitas Anggaran	Rasio Operasional	0,99145146	1,039891584	1,024945464	0,980312308
	Surplus atau Defisit Per Kapita	(38.460,41)	85.964,43	61.556,52	(100.864,14)
	Rasio Aset Bersih	0,993976251	0,993663208	0,992684621	0,994709246

Dimensi	Indikator	Median			
		2019	2020	2021	2022
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
	Kewajiban Jangka Panjang Per Kapita	0	0	0	0
Solvabilitas Layanan	Pajak Per Kapita	423.017,54	391.236,09	446.252,87	532.979,80
	Pendapatan Per Kapita	3.763.258,50	3.505.829,98	3.682.417,66	3.667.988,49
	Belanja Per Kapita	3.979.753,33	3.376.297,62	3.423.709,61	3.534.268,90

Solvabilitas Kas

Penghitungan ini menggunakan indikator rasio lancar yaitu membandingkan total aset lancar dan total utang lancar untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah kota dalam membayar utang yang jangka waktunya ≤ 1 tahun. Tabel 2 menunjukkan nilai median rasio lancar secara berurutan dari tahun 2019-2022 adalah 11,27, 10,81, 12,68, 12,76. Angka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah kota di Pulau Jawa memiliki kemampuan likuiditas yang baik untuk melunasi utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Pada tahun 2020, nilai solvabilitas jangka pendek mengalami penurunan dan hal tersebut bertepatan dengan awal pandemi covid-19. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota menghadapi banyak penyesuaian, salah satunya belanja tak terduga untuk penanganan kesehatan. Sesuai dengan temuan Padovani et al. (2021) menjelaskan pentingnya aset lancar supaya menjaga likuiditas dan kemampuan membayar utang jangka pendek ketika menghadapi krisis. Nilai solvabilitas jangka pendek paling tinggi terjadi di tahun 2022, artinya persentase ketersediaan aset lancar setiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan utang lancar. Pemerintah daerah lebih menutup utang lancar dengan aset lancar yang dimiliki. Penelitian ini sejalan dengan Mamun & Chowdhury (2022) yaitu pemerintah daerah harus memiliki rasio lancar minimal 1,0 supaya dapat memenuhi kewajiban lancar.

Nilai rasio lancar tertinggi dari data observasi adalah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 karena adanya penurunan kewajiban lancar yang cukup signifikan. Selain itu pada CaLK Pemerintah Kota Yogyakarta disebutkan realisasi PAD diperoleh sebesar 114,41%, mencerminkan kinerja pendapatan yang melampaui ekspektasi. Capaian ini turut berkontribusi pada peningkatan kas dan setara kas secara signifikan yang mencerminkan posisi likuiditas daerah semakin kuat serta memberikan ruang fiskal lebih fleksibel dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah. Rasio lancar yang tinggi ini menunjukkan adanya pengendalian utang lancar dan kemampuan membayar utang lancar sesuai waktu yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio lancar, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi utang jangka pendek tanpa harus menjual aset tetap atau mencari sumber pembiayaan tambahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kas, piutang, dan aset lancar lainnya berjalan secara sehat dan efisien. Dalam konteks keuangan, rasio lancar yang meningkat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih stabil dan fleksibel, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk merespons kebutuhan mendesak atau fluktuasi ekonomi jangka pendek. Hal ini dapat menjadi sinyal positif terhadap tata kelola keuangan, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, termasuk dalam hal akuntabilitas. Namun demikian, meskipun peningkatan rasio lancar umumnya dianggap baik, angka yang terlalu tinggi juga perlu dianalisis lebih lanjut. Hal tersebut bisa saja mengindikasikan terlalu banyak dana yang mengendap dan tidak segera dimanfaatkan untuk belanja publik atau pembangunan, yang berarti efektivitas penggunaan anggaran masih bisa ditingkatkan.

Pemerintah daerah yang mampu mempertahankan solvabilitas kas pada tingkat yang tinggi menunjukkan kinerja likuiditas yang baik, mencerminkan kemampuan jangka pendek untuk memenuhi kewajiban keuangan tanpa tekanan fiskal yang berlebihan.

Kondisi ini menciptakan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program prioritas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Ketika solvabilitas kas yang kuat berjalan beriringan dengan tingkat IPM yang tinggi, hal ini mencerminkan bahwa keuangan daerah tidak hanya dikelola secara sehat, tetapi juga diarahkan secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, kekuatan likuiditas yang dimiliki pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi investasi sosial yang berdampak langsung terhadap dimensi pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari capaian IPM Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 88 (paling tinggi diantara pemerintah kota non administratif di Pulau Jawa).

Solvabilitas Anggaran

Dimensi ini menggambarkan kemampuan pemerintah kota untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi pengeluaran operasional. Terdapat dua indikator yaitu rasio operasional dan surplus atau defisit per kapita. Tabel 2 menunjukkan nilai median rasio operasional dan surplus atau defisit per kapita dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Rasio surplus atau defisit per kapita pada tahun 2019 adalah defisit artinya jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang diterima, menggambarkan masih memiliki ketergantungan karena harus menggunakan sumber lain. Terjadinya defisit pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah melebihi pendapatan yang diterima dalam periode anggaran tertentu. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya keterbatasan fiskal dalam membiayai seluruh kebutuhan belanja publik secara mandiri, khususnya jika defisit tersebut tidak diimbangi dengan pembiayaan yang memadai atau produktif. Faktor penyebab lainnya dapat ditemukan dari penelitian Farhana & Siti-Nabiha (2023) menjelaskan adanya krisis dari dampak covid-19, beberapa negara memiliki kecenderungan yang serupa dalam mengelola anggaran yaitu lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Sejalan dengan Desdiani et al. (2022) menganalisis ketika pandemi pemerintah daerah hanya fokus pada peningkatan pengeluaran untuk tenaga kesehatan rata-rata sebesar 3% dan komponen lain pengeluaran kesehatan untuk barang dan jasa kesehatan tetap stabil.

IPM merupakan ukuran kualitas hidup masyarakat, yang sangat bergantung pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, surplus per individu yang dikelola secara tepat akan menciptakan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian IPM, baik melalui pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dasar, maupun perlindungan sosial yang inklusif. Namun demikian, nilai surplus per kapita yang tinggi hanya akan bermanfaat secara nyata jika disertai dengan kebijakan anggaran yang progresif dan berorientasi pada pembangunan manusia

Nilai rasio operasional paling tinggi dari data observasi adalah Kota Probolinggo pada tahun 2021. Nilai Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp8.326.878.076.226,29 mengalami kenaikan sebesar 7,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio selanjutnya adalah rasio surplus defisit per kapita. Berdasarkan Tabel 3 Nilai rasio tertinggi diperoleh Kota Magelang di tahun 2020 sebesar Rp1.216.493,342, mencerminkan surplus ini dianggap sebagai indikator daya dukung fiskal pemerintah terhadap penduduk, dimana semakin besar nilai surplus per kapita, semakin besar pula potensi kontribusi fiskal pemerintah untuk mendorong kesejahteraan tiap individu. Rasio surplus/defisit per kapita menggambarkan posisi fiskal bersih pemerintah daerah yang dihitung dari selisih antara pendapatan dan belanja daerah, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini memberikan perspektif tentang kapasitas fiskal bersih per individu, sekaligus menjadi indikator efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Ketika rasio ini

menunjukkan angka positif (surplus), hal tersebut mencerminkan bahwa pendapatan daerah telah melampaui belanja yang direalisasikan dan secara umum menunjukkan kondisi fiskal yang sehat. Pada konteks pengelolaan keuangan daerah, surplus per kapita yang positif menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan secara efisien, serta menyediakan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2, Kota Magelang pada tahun 2020 memiliki nilai indeks pembangunan manusia sebesar 78,99 (diatas nilai median 78,23). Surplus per individu yang dikelola secara tepat akan menciptakan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian IPM, baik melalui pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dasar, maupun perlindungan sosial yang inklusif. Namun demikian, nilai surplus per kapita yang tinggi hanya akan bermanfaat secara nyata jika disertai dengan kebijakan anggaran yang progresif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Ketersediaan ruang fiskal yang memadai memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja ke sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial-tiga komponen utama pembentuk IPM. Dengan pengelolaan anggaran yang cermat, surplus fiskal dapat diarahkan untuk memperluas akses terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial, dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan manusia. Namun, perlu diingat bahwa nilai surplus yang tinggi tidak otomatis berdampak langsung terhadap IPM, kecuali jika kelebihan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan secara produktif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga memastikan bahwa surplus yang tercipta dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui belanja publik yang tepat sasaran.

Solvabilitas Jangka Panjang

Dimensi ini menjelaskan kemampuan pemerintah kota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Pengukuran dilakukan dengan tiga indikator yaitu rasio aset bersih, rasio kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka panjang per kapita. Nilai median dari indikator tersebut yang memiliki angka >0 adalah indikator rasio aset bersih yang dihitung berdasarkan nilai aset bersih dibandingkan dengan total aset. Hal ini menunjukkan pemerintah cenderung tidak melakukan pinjaman (khususnya pinjaman jangka panjang). Sejalan dengan Vértesy (2020) Pemerintah Daerah berusaha mengurangi risiko suku bunga jangka Panjang. Penelitian Qu et al. (2023) mendukung dengan menjelaskan pemerintah daerah cenderung menghindari utang jangka panjang karena tekanan fiskal dan upaya untuk mempertahankan daya saing daerah. Runjung (2024) menjelaskan nilai kewajiban jangka panjang yang rendah mencerminkan efisiensi dalam belanja.

Berdasarkan tabel 3, nilai rasio aset bersih paling tinggi diperoleh Kota Magelang di tahun 2019 sebesar 0,99. Kota Magelang dapat mempertahankan pelayanan publik dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan dengan tidak bergantung pada pinjaman. Sebagian besar kota di Pulau Jawa tidak memiliki utang jangka panjang sehingga meminimalisir ketergantungan pembiayaan pembangunan dari utang. Ketersediaan aset bersih yang cukup dapat mendukung pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan optimal ke sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks pembangunan manusia Kota Magelang tahun 2019 sebesar 78,80 (lebih tinggi dari nilai median sebesar 78,11). Hal ini menunjukkan tingkat aset bersih yang tinggi pada Pemerintah Kota Magelang juga sejalan dengan IPM yang tinggi.

Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan merupakan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan tingkat layanan yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat (Wang et al., 2007). Dimensi tersebut memiliki tiga indikator yaitu pajak per kapita, pendapatan per kapita dan belanja per kapita. Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan tingkat layanan masih rendah. Berdasarkan Mamun & Chowdhury (2022), pajak per kapita dan pendapatan per kapita mengukur beban pajak dan beban pendapatan, sedangkan belanja per kapita menunjukkan biaya layanan.

Berdasarkan data yang diobservasi, nilai rasio pajak per kapita dengan angka terkecil senilai 75.397, rasio pendapatan per kapita senilai 1.204.137, dan rasio belanja per kapita senilai 1.342.543. Solvabilitas layanan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik yang penting bagi masyarakat dan menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Observasi Tahun 2019-2022

Dimensi	Indikator	N	Rata-Rata	Median	Maksimum	Minimum
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio Lancar	116	23,60614	12,49793	232,4865	0,954160764
Solvabilitas Anggaran	Rasio Operasional	116	1,125904569	1,010097095	9,266957292	0,096995814
	Surplus atau Defisit Per Kapita	116	6.547,944148	13.787,77948	1.216.493,342	(1.052.279,491)
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio Aset Bersih	116	0,991154	0,993492996	0,99951583	0,942136743
	Rasio Kewajiban Jangka Panjang	116	0,000678306	0	0,039007847	0
	Kewajiban Jangka Panjang Per Kapita	116	8.083,978145	0	588.842,4198	0
Solvabilitas Layanan	Pajak Per Kapita	116	537.868	454.017	1.439.972	75.397
	Pendapatan Per Kapita	116	3.710.507	3.684.748	8.176.688	1.204.137
	Belanja Per Kapita	116	3.704.395	3.523.169	8.543.263	1.342.543

KESIMPULAN

Berdasarkan data statistik disimpulkan nilai solvabilitas kas dari rasio lancar masing-masing sebesar 11,27; 10,81; 12,68; dan 12,76 menunjukkan bahwa pemerintah kota di Pulau Jawa memiliki likuiditas yang cukup baik, yang tercermin dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Berdasarkan perbandingan antara kota-kota tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2022 mencatat rasio lancar tertinggi, sekaligus memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi yaitu sebesar 88, yang mengindikasikan kinerja keuangan yang solid sejalan dengan capaian pembangunan manusia yang optimal.

Rasio operasional Kota Probolinggo yang paling tinggi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mampu menutupi sebagian besar belanja daerah. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pendapatan untuk membiayai kebutuhan belanja, serta menunjukkan tingkat kemandirian dalam pengelolaan keuangan tanpa ketergantungan berlebih pada sumber pendanaan eksternal. Pada tahun 2020, Kota Magelang mencatat rasio surplus/defisit per kapita tertinggi sebesar Rp1.216.493,34 per penduduk, yang menunjukkan kemampuan pengelolaan anggaran daerah yang positif. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Magelang juga tergolong tinggi, yaitu 78,99, di atas nilai median 78,23. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kondisi keuangan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rasio kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka panjang per kapita menjadi ukuran penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah kota di Pulau Jawa memiliki kewajiban jangka panjang yang relatif rendah, sehingga beban keuangan jangka panjangnya masih terkendali. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam pengelolaan utang daerah yang berpotensi menjaga stabilitas keuangan di masa mendatang. Nilai rasio aset bersih Kota Magelang

yang tinggi pada tahun 2019 sebesar 0,99 menunjukkan kondisi solvabilitas jangka panjang yang kuat. Pada tahun yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Magelang tercatat sebesar 78,80, berada di atas nilai median 78,11, yang berarti kualitas pembangunan manusia di Kota Magelang tergolong lebih baik dibandingkan rata-rata kota lain di wilayah tersebut. Rasio pendapatan per kapita sebesar 1.204.137 mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, rasio belanja per kapita sebesar 1.342.543 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan program-program pembangunan dan penyediaan layanan publik. Kedua rasio ini memberikan gambaran mengenai skala peran fiskal yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.

REFERENCES

- Alfauzi, R. (2022). Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2134>
- Bhowmik, D. (2018). *Assumption University-eJournal of Interdisciplinary Research (AU-eJIR): Vol. 3. Issue.2, 2018 NEXUS BETWEEN GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: EVIDENCE FROM*. 3(2), 96–118.
- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., Citro, F., & Bisogno, M. (2019). Does financial health influence the re-election of local governments? *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(3), 345–363. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0114>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22(1), 473–500. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/economies10050108>
- Farhana, I., & Siti-Nabiha, A. K. (2023). Government budgetary responses to the COVID-19 crisis: insights and future directions for crisis budgeting research. *International Journal of Social Economics*, 51(9), 1136–1150. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2023-0057>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Hanifi Van, M., Caglayan Akay, E., Çağlayan-Akay, E., & Hanifi Van, M. (2017). Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: Bayesian Ordered Probit Model International Journal of Economics and Financial Issues Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: Bayesian O. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 425–431. <http://www.econjournals.com>
- Indonesia, R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. 460. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Indonesia, R. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, Republik. 2019-2022. Badan Pemeriksa Keuangan: Laporan Hasil Pemeriksaan.

Indonesia, Republik. 2020-2023. Badan Pusat Statistik.

- Khairudin, & Aminah. (2017). Analysis of Effectiveness of New Region Expansion in Lampung Province. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(3), 263. <http://buscompress.com/journal-home.html>.
- Kousar, S., Ahmed, F., Afzal, M., & Segovia, J. E. T. (2023). Is government spending in the education and health sector necessary for human capital development? *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01514-3>
- Linhartová, V. (2020). The effect of government expenditure on human capital in the Czech Republic. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(2). <https://doi.org/10.46585/SP28021056>
- Listiyani, N., Zulfikar, R., Jaelani, A., & Susanto, D. (2022). Determination Strategies for HDI Improvement Using SWOT Matrix Toward Sustainable Development and Good Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1111(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1111/1/012074>.
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). Government Expenditure and Human Development in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901>.
- Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test." *Government Finance Review*, October, 61–66.
- Mamun, T. M., & Chowdhury, S. (2022). Assessing fiscal health of local governments in Bangladesh: evidence from some south-western municipalities. *Public Administration and Policy*, 25(1), 50–63. <https://doi.org/10.1108/PAP-04-2021-0027>
- Marbun, R., Urip, T. P., & Indahyani, R. (2023). Asymptotic Significance Test on Financial Performance in Papua Province Government. *International Journal of Professional Business Review*, 8(8), e01580. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.1580>.
- Martell, C. R. (2024). The impact of inflation on local government fiscal health. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 36(2), 234–252. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2023-0171>.
- Matdoan, M. Y., Balami, A. M., Kondolembang, F., & Latupeirissa, S. J. (2023). Penerapan Metode Median Clustering untuk Clusterisasi Peternakan di Provinsi Maluku. *Journal of Statistics and Its Application*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.20956/ejsa.vi.24452>
- McDonald, B. D. (2018). Local Governance and the Issue of Fiscal Health. *State and Local Government Review*, 50(1), 46–55. <https://doi.org/10.1177/0160323x18765919>
- Nyberg, J. (2016). *Lifestyle welfare in Sweden*. 1–10.
- Padovani, E., Iacuzzi, S., Jorge, S., & Pimentel, L. (2021). Municipal financial vulnerability in pandemic crises: a framework for analysis. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(4), 387–408. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0129>
- Pasoloran, O. (n.d.). *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*.
- Qu, X., Xu, Z., Yu, J., & Zhu, J. (2023). Understanding local government debt in China: A regional competition perspective. *Regional Science and Urban Economics*, 98(March 2022). <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2022.103859>
- Ritonga, IT. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Pemda Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Runjung, R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma & Elwira Mulya Nalien. (2024) Analisis Keuangan Pemerintah dengan Model Fiscal Trend Monitoring System: Studi Kasus Kabupaten Bandung. *Indonesian Treasury Review Vol 9 No 24*
- Saepudin, T. (2018). Development of electricity program, electrification ratio with human development index in west Java province, Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(1), 227–230.
- Silitonga, N. et. al. (2021). The Moderating Effect Of Regional Independence On The Effect Of Financing Policies, Capital Expenditure And Transfer Fund Towards The Performance Of Local Governments. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 5239–5251. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.2153>
- Simatupang, M. (2020). Impact of Financial Inclusion, Government Expenditures in Education and Health Sectors on Human Development in Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 9(2), 5. <https://doi.org/10.26458/jedep.v9i2.643>
- Suranta, S., Bandi, B., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2019). Regional financial performance and human development index: Study in Central Java and South Kalimantan provinces. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art2>
- Vértesy, L. (2020). Debt Management Strategies of Local Governments in the EU. *Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás*, 8(1), 146–169. <https://doi.org/10.32575/ppb.2020.1.8>
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. sen jeff. (2007). Measuring financial condition: A Study of U.S. States. *Public Budgeting and Finance*, 27(2), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>
- Wardana, A. K., Mlati, K., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2025). *Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa*. 9(1), 33–61.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia Ratna Wardhani *, Hilda Rossieta and Dwi Martani. *Int. J. of Public Sector Performance Management*, 3(1).
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2024). The Effect of Financial Performance on Capital Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, and Poverty. *Quality - Access to Success*, 25(200), 188–202. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.200.20>